

BAB III

HUBUNGAN ANTARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DENGAN PESANTREN

Pengenalan

Bab ini membahas bagaimana relasi atau hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan pesantren. Dalam kajian-kajian lepas, yang membahas mengenai pesantren dan hubungannya dengan politik, belum banyak ditemukan tipologi tentang relasi itu.¹ Sebagaimana diketahui bahwa berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 juli 1998 difasilitasi sepenuhnya oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan kiyai-kiyai di kalangan Pesantren, NU tidak pernah melahirkan anak lain selain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bisa dikatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah satu-satunya anak sah NU.² Meskipun demikian, kajian ini mencoba melakukan pemetaan ulang tentang hal tersebut.

Memahami relasi atau hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pesantren, merupakan dasar dari pembahasan dalam kajian ini. Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan pesantren yang nantinya akan sangat menentukan bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memerankan fungsinya sebagai partai politik terhadap pesantren yang berbeza ekspresi dukungannya tersebut. Selain penting bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sikap politik yang

¹ Muhibbin, *Politik Kiai vs Politik Rakyat: Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Jember, 2012.

² Eman Hermawan, "Gus Dur, PKB dan NU" dalam: Eman Hermawan dkk, *Membangun PKB Tanpa Gus Dur*, Jakarta, PDIP-KB, 2008, hlm. 21.

ditunjukkan oleh pesantren itu juga memiliki makna bagi pesantren itu sendiri. Ukuran partisipasi politik pesantren salah satunya akan diukur dari dukungan yang diberikan oleh pesantren tersebut. Argumentasi yang dibangun oleh kalangan pesantren terhadap sikap politik yang mereka tunjukkan menjadi bagian yang sangat menarik untuk dicermati.

Ideologi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Ideologi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijadikan pedoman normatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan dapat memberikan panduan dan motivasi dalam perjuangan kehidupan berkebangsaan dan kebernegeraan.³

Kerana itu, ideologi politik partai politik dapat dipahami sebagai sistem kepercayaan yang memberikan kesadaran dan pencerahan-pencerahan mengenai kehidupan politik demi menggalang motivasi, hingga tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan partai politik. Artinya, ideologi dalam partai politik berperan sangat strategis sebagai landasan legitimasi politik yang sekaligus memberi panduan bagi seluruh kebijakan dan perilaku politik, serta sebagai tali pengikat aktiviti-aktiviti politik.⁴

Sejak awal kemerdekaan atau pada masa orde lama Ideologi politik Indonesia terbahagi dalam lima aliran politik/ ideologi. Kelima aliran politik tersebut ialah:

³ M Djadijono, *Desain Baru Sistem Politik Indonesia*, cet – 1, Jakarta: CSIS, 2006, hlm. 23. Untuk kajian yang agak mendalam soal ideologi, lihat dalam Raymond Geuss, *The Idea of Critical Theory: Habermas and The Frankfurt School*, Cambridge University Press, 1981, hlm. 5-11.

⁴ Ibid, hlm. 11

Komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung atau tidak langsung dari barat, meskipun mereka juga bekerja sama dengan kaum abangan tradisional dan himbauan politik yang serupa. Komunisme mengambil bentuk utama dari *Partai Komunis Indonesia* (PKI). Yang kedua, *Sosialis Demokratik (Democratic Socialism)* yang juga moden dalam ideanya yang sentral, akan tetapi kurang berjaya dalam membangun dirinya ditengah masyarakat. Ia mengambil bentuk nyata dalam parti-parti sosialis. Namun sosialis demokratik memberikan pengaruh yang kuat kepada parti-parti lainnya terutama parti Masyumi dan PNI. Ketiga, *Islam* yang terbahagi menjadi kelompok agama dan politik dibawah pimpinan kaum reformis yang berpusat pada parti Masyumi dan yang tradisional yang berpusat pada *Nahdatul Ulama*. Keempat, nasionalisme radikal. Ia berhubungan dengan tradisionalisme Jawa, Komunisme dan dengan Sosialisme Demokratik. Ia mengambil bentuk nyata dalam Partai Nasional Indonesia. Kelima, *Tradisionalisme Jawa*, penganut tradisi-tradisi Jawa. Ini agak kontroversial, kerana ia tidak mampu memanifestasikan diri dalam bentuk parti-parti yang nyata.⁵

Pada perkembangannya, sampai ketika memasuki masa orde baru, ideologi parti politik ini mengalami kemunduran, keberadaan banyak parti pada masa sebelumnya mengalami penggabungan atau fusi menjadi dua parti dan satu golongan, iaitu PPP, PDI dan golongan karya. Dua parti politik dan satu golongan ini merupakan rekayasa pemerintah, sifatnya pun ialah menyesuaikan dengan keperluan pilihan raya, jadi dengan kata lain ideologi bukan sebagai pijakan pembentukan parti, akan tetapi parti yang sudah dibentuk kemudian “dilabeli” ideologi. Dengan dipaksanya fusi kepada semua parti politik di Indonesia pada tahun 1973 maka

⁵ Farchan Bulkin, *Analisis Kekuatan Politik Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 218

terbukalah sejarah yang sama sekali baru dalam panggung perpolitikan di Indonesia. Indonesia mengalami keadaan politik dimana ada sistem kepartian, namun pelaku politik dalam hal ini dua partai politik yaitu PPP dan PDI seolah berada jauh dari sistem politik yang sedia ada tersebut, hal ini disebabkan adanya hegemoni Golongan Karya.⁶

Bergerak pada masa kejatuhan orde baru sehingga muncul reformasi, pertumbuhan Partai Politik selepas reformasi awalnya didasari atas kepentingan bersama untuk setiap ahlinya. Boleh jadi, masa reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari atas suatu kepentingan, orientasi politik dan ideologi yang sama di antara anggotanya. Ini disebabkan kerana pada ketika ini bagi setiap partai politik diberi kebebasan untuk menentukan ciri serta platform tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-cita partai politik masing-masing. Hampir seperti kembali pada masa awal kemerdekaan dan orde lama, ada lima kutub ideologi iaitu nasionalis, tradisional, religius, sosialis, demokratis, kelimanya berkembang menjadi sedikitnya 9 ideologi yang menjadi basis parti-parti yang tumbuh, iaitu Nasionalis-Radikal, Islam (Religius), Kristian (Religius), Sosialis-Demokrat, Tradisional-Jawa, Nasionalis-Moderat, Nasionalis-Kiri, dan Nasionalis-Kanan.⁷

Pada 21 hari bulan Mei 1998, Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya sebagai akibat dari pada desakan arus reformasi yang kuat, mula yang mengalir dari diskusi terhad, tunjuk perasaan, tunjuk kepedulian, sampai *istighosah* dan lain sebagainya. Peristiwa ini dianggap telah mengubah dasar dan konstelasi politik

⁶ Ibid, hlm. 217.

⁷ Herbert Feith dan Lance Castles, eds., *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Ithaca: Cornell University Press, 1979, hlm. 14

mutakhir di Indonesia. Hal ini ditandai oleh 3 hal penting, yaitu: *Pertama*, runtuhnya hegemoni Orde Baru dengan pilar utamanya yaitu Golkar, yang ditopang oleh birokrasi dan militer.⁸ *Kedua*, munculnya sistem politik multipartai yang memberi peluang kepada setiap kelompok politik dengan beragam latar belakang aspirasi dan ideologi untuk ikut serta meramaikan panggung politik nasional. *Ketiga*, terjadinya pergeseran hubungan antara agama (baca; Islam) dan negara.

Perpolitikan di Indonesia yang memasuki babakan baru ini, tidak hanya ditandai oleh peralihan takhta kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie, melainkan juga munculnya berbagai macam partai Islam politik setelah pemerintahan transisi Habibie menghapus sistem tiga partai Islam yang dipaksakan oleh rezim Soeharto. Pembentukan partai Islam semakin menemukan momentumnya dengan penghapusan Undang-undang Organisasi massa tahun 1985 yang mewajibkan semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar Ideologi. Munculnya partai-partai politik laksana cendawan di musim hujan juga merupakan akibat adanya akumulasi berbagai persoalan ideologi politik bangsa yang selama lebih dari tiga puluh tahun diperlakukan secara diskriminatif dalam pembentukan platform bangsa ini.⁹

Warga *Jam'iyah* NU, sebagai bagian dari Bangsa Indonesia dan organisasi yang memiliki kurang lebih 30 juta anggota, ternyata tidak mau begitu saja

⁸ Tentang kekuatan militer pada masa pemerintahan orde baru dapat dilihat dalam Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Jakarta: Equinox Publishing, 2007.

⁹ Bahrul Ulum, "*Bodohnya NU*" apa "*NU dibodohi?*", *Menguji Khittah, Meneropong "Pergeseran" Paradigma Politik*, Yogyakarta: AR-RUZZ PRESS, 2002, hlm. 133

melewatkan kesempatan emas dari arus perubahan tersebut, apalagi selama lebih dari tiga dasa warsa NU termarginalisasi dalam bidang politik.¹⁰

Peristiwa ini sekaligus menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut sebagai era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mula kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air.¹¹ Berbagai cara ditempuh untuk menyamapaikan usulan tersebut, ada yang melalui faksimili, telegram, surat-surat, email bahkan ada yang langsung datang ke sekretariat Jenderal PBNU. Usulan tersebut bernada sama, yaitu agar PBNU membantu mewujudkan adanya satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU, berasal dari perorangan, kelompok dan pengurus di lingkungan NU maupun badan otonomi dan lembaga di lingkungan NU.¹²

Tidak mudah untuk mendirikan partai tunggal yang akan menjadi kendaraan politik yang ideal bagi sebagian besar warga NU. Cukup banyak yang mengusulkan NU kembali menjadi partai. Realitas politik menunjukkan bahwa sejumlah warga NU masih menjadi anggota, aktivis dan pimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedikit lebih kecil jumlahnya masih aktif di Golkar, khususnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara dan lainnya.¹³ Akan tetapi usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parti politik, ada juga yang mengusulkan nama parti politik. Tercatat ada 39 nama parti politik yang diusulkan.¹⁴ Pertemuan terakhir dalam proses pembentukan partai warga NU di Bandung memberi alternatif tiga nama yaitu Partai

¹⁰ Ibid.

¹¹ DPW PKB Jawa Barat, *13 Alasan Memilih PKB, Cet – 1*, Bandung: PKB Jawa Barat, 2008, hlm. 14

¹² DPW PKB Jawa Timur, *Dokumen Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: 1998, hlm. 25

¹³ Salahuddin Wahid, *Menggagas Peran Politik NU*, Jakarta, Pustaka Indonesia Satu, 2002, hlm. 65.

¹⁴ DPW PKB Jawa Timur, *Dokumen Deklarasi*, hlm. 25

Nahdlatul Ummat, Partai Kebangkitan Umat dan Partai Kebangkitan Nasional. Ketiga nama tersebut tidak diambil oleh KH. Abdurrahman Wahid yang lalu memilih sendiri nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pertemuan di Bandung itu juga masih menunjukkan nuansa keislaman di dalam partai yang akan dibentuk. Tetapi nuansa keislaman itu dikurangi secara berarti dengan tujuan membuat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bercitra diri sebagai parti kebangsaan dan menjadi parti yang terbuka.¹⁵

Ada juga yang mengusulkan lambang parti politik. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parti politik ialah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parti politik, AD/ART parti politik, nama-nama untuk menjadi pengurus parti politik, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap ialah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNNU Jawa Barat.¹⁶

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahawa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahawa secara organisasi NU tidak terkait dengan mana mana parti politik manapun dan tidak melakukan aktiviti politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parti politik untuk menampung aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan parti

¹⁵ Salahuddin Wahid, *Menggagas Peran*, hlm. 66.

¹⁶ Ibid.

politik ialah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.¹⁷

Akhirnya, PBNU mengadakan Musyawarat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU 3 hari bulan Jun 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.¹⁸ Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Penyelaras Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Setiausaha Agung PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisasi, Tim Lima itu diberi Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan parti politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU 20 hari bulan Jun 1998 memberi Surat Tugas kepada Team Lima, selain itu juga dibentuk Team Pembantu yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Timbalan Setiausaha Agung PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar.¹⁹ Team Asistensi bertugas membantu Team Lima dalam menampung, mengumpul dan merangkum usulan yang ingin membentuk parti politik baharu, dan membantu warga NU untuk melahirkan parti politik baharu yang dapat mewartakan aspirasi politik warga NU.

¹⁷ Bahrul Ulum, "*Bodohnya NU*" apa, hlm. 134.

¹⁸ DPW PKB Jawa Barat, *13 Alasan Memilih.*, hlm. 14

¹⁹ Ibid.

Pada 22 hari bulan Jun 1998 Team Lima dan Team Pembantu atau Asistensi mengadakan musyawarat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998 Team Lima dan Team Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parti politik. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Parti Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.²⁰

Sebagai parti politik yang lahir dari rahim NU, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memastikan dirinya sebagai parti yang berwatak nasionalis-religius. Tidak syak jika bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), keislaman dan keindonesian harus berjalan seiring.²¹ Sinergi keislaman dan keindonesian telah mencipta karakter Islam Indonesia dalam nilai-nilai prinsip Ahlussunnah waljama'ah dalam pembahasan meliputi :

at-Tawazun, Kata tawazun dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan dan tentu masih memiliki banyak penegrtian. Pengertian keseimbangan, bisa dipahami dari dua arus besar pemikiran aqidah antara tekstualis dan mengurai dua kutub tersebut dengan posisi seimbang. Penerapan secara bersama antara wahyu dan akal dalam mencari kebenaran dapat berjalan secara seimbang. Pada konsepnya, wahyu tetap menjadi rujukan utama, dan akal manusia kalau tidak mampu menjawab terhadap sesuatu hal yang dicarinya, maka pikiran manusia harus tunduk pada wahyu. Penerapan konsep keseimbangan tentu dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil

²⁰ Ibid., hlm. 13.

²¹ Ibid.

'*aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* (dalil yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits).²²

at-Tasamuh, kata Tasamuh yakni bermakna toleransi, memiliki makna kontradiksional, seperti kata ekstrim yang merujuk pada sebuah paham atau gerakan yang melegalkan berbagai tindakan asal tercapai apa yang menjadi cita-cita pergerakannya. Penanaman prinsip Tasamuh ini sangat penting dalam membangun relasi antar sesama umat. Tujuan utamanya adalah agar terciptanya suasana saling menghargai dan tidak ada saling menghina, tidak merendahkan orang lain, dan tidak terjerumus pada situasi cerai berai, dengan tasamuh antara yang mayoritas dengan yang minoritas akan harmoni.²³ Dan tidak berlebihan (*tawassuth*). Yakni nilai moderat yang diwujudkan dalam sikap tengah-tengah, sedang-sedang, atau tidak menjadi bagian yang ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan.²⁴

Identiti nasionalisme-religius yang disandang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada dasarnya merupakan kristalisasi dari gagasan, sejarah dan tradisi Islam Indonesia yang moderat, terbuka dan dialogis. Posisi ideologi dengan perspektif teologi yang kental ini selaras dengan gagasan cerdas nan agung founding fathers Indonesia yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pilihan yang disokong penuh oleh ulama-ulama ahlussunnah wal jama'ah itu sangat relevan dengan realii kebangsaan Indonesia yang majemuk dan berbilang budaya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan para ulama dibelakangnya percaya bahawa dalam hal "perjuangan keagamaan", membesarkan agama bukan bererti

²² Marwan Ja'far, *Ahlussunnah wal Jama'ah.*, hlm. 33.

²³ Ibid., hlm. 36

²⁴ DPW PKB Jawa Barat, *13 Alasan Memilih.*, hlm. 15.

mesti mengecilkan agama orang lain.²⁵ Demikian pula, upaya untuk menjunjung tinggi agama tidak semestinya dilakukan dengan menindas agama orang lain. “Perjuangan keagamaan” yang tulen atau murni ialah perjuangan kemanusiaan yang mengedepankan cinta kasih, persaudaraan dan kehendak untuk hidup bersama secara damai. Kepentingan bersama sebahagai suatu bangsa, dengan demikian, mesti menundukkan kepentingan-kepentingan sebahagian yang sempit, yang justeru akan merendahkan agama (Islam) dan kemanusiaan.

Menempatkan kepentingan bersama (nasional) diatas kepentingan sebahagian atau parsial apapun secara pasti merupakan perjuangan yang dilandasi semangat keberagaman yang tinggi. Islam moderat, inklusif dan toleran yang sentiasa menjadi gerak politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan bahawa perjuangan PKB sama sekali tidak mengesampingkan agama, melainkan justeru meluhurkannya.²⁶ Muara dari itu semua ialah dengan mewujudkan Indonesia yang adil-makmur, demokratik dan berbilang budaya atau multikultural (pluralis), dimana Islam menjadi landasan etik bahagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keyakinan terhadap Islam Indonesia yang moderat, toleran dan anti-diskriminasi itulah yang memungkinkan umat Islam Indonesia memberi sumbangan secara optimum dalam pelbagai proses penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa pada amnya. Sejarah telah membuktikan hal itu, demikian pula dengan PKB yang secara tegas menolak formalistik syariat Islam dalam konstitusi negara mahupun dalam pelbagai bentuk regulasi nasional dan daerah. PKB berdasarkan sejarah dan fakta sentiasa menunjukkan kepentingannya untuk menjaga “watak

²⁵ Ibid., hlm. 18.

²⁶ Ibid.

nasional” negara-bangsa Indonesia, sehingga keislaman dan keindonesian berjalan seiring, utamanya dalam menghadapi tantangan peralihan demokrasi di Indonesia dan globalisasi yang hampir tidak dapat dielakkan.²⁷

Penting dicatat bahawa peranan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semacam itu hampir tidak tergantikan oleh kekuatan politik lain. Hal ini cukup beralasan kerana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatukan tiga kriteria sekaligus yang memungkinkannya bergerak secara memadai (*suitable*) pada aras politik nasional dan daerah.²⁸ *Pertama*, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memegang legitimasi politik Islam yang kuat kerana basis pemilihnya atau konstituennya adalah komuniti muslim yang moderat (NU). *Kedua*, posisi ideologi Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan artikulasi politiknya secara historis dan fakta mensinergikan dimensi keislaman dan keindonesiaan (kebangsaan). *Ketiga*, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan parti politik, dan kerananya dapat memainkan peranan dalam pentas politik perwakilan. Kekuatan politik lain –baik parti mahupun bukan-parti-- rata-rata hanya merepresentasi salah satu atau salah dua dari kriteria tersebut.

Parti-parti politik nasionalis, misalnya, memiliki ideologi dan artikulasi politik kebangsaan yang tidak diragukan, namun kebanyakan mereka tidak memegang apa yang disebut sebagai “legitimasi politik Islam”. Pada sisi yang lain, parti-parti Islam memiliki masalah yang lebih serius. Paradigma keislaman mereka cenderung “kanan” atau bahkan “kanan luar”, dan tidak jarang absen dari wacana dan praktik politik kebangsaan. Sementara itu, ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah

²⁷ Yenny Zanuba Wahid, dkk, (ed), *9 Tahun PKB; Kritik dan Harapan*, Jakarta: Panitia Harlah 9 PKB, 2007, hlm. 10.

²⁸ *Ibid.*

yang moderat terbentur pada peranan mereka yang terbatas pada jalur non-parlimen.²⁹

Mabda Siyasi³⁰ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)³¹

Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera zahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.³²

1. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang menerapkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syuro*) yang

²⁹ Ibid.

³⁰ Secara harfiah mabda siyasy berarti kaidah – kaidah politik yang menjadi landasan berpolitik bagi Partai Kebangkitan Bangsa.

³¹ Naskah Mabda Siyasy ini dikutip utuh dari www.dpp-pkb.or.id. Diunduh 22 Maret 2013.

³² Ibid.

menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara dihadapan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang mesti ditegakkan.³³

2. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ialah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera zahir dan batin, yang setiap warganya mampu menerapkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dan keperluan asas manusia seperti tempat tinggal, makan dan pendidikan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa hadapan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan *amar ma'ruf nahi munkar* iaitu menyeru kepada kebajikan serta menegah dari segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.³⁴
3. Penjabaran dari misi yang dipikul guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan tersebut tidak dapat tidak mesti dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan awam. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan awam melalui

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoriti dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang mengkongkong kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedar dan yakin bahawa kekuasaan itu mutlak milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya dapat diberikan pada pihak lain yang memiliki kepakaran dan kemampuan untuk menjalankan dan memikulnya. Kepakaran dan keupayaan dalam memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan perjuangan yang sentiasa memihak kepada pemberi amanat.³⁶
5. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu mesti dapat diurus dan dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu mesti dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meyakini bahawa kekuasaan yang hakikatnya ialah amanat itu mestilah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

Tuhan dan dapat dikawal pengelolaannya oleh rakyat. Kawalan terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan bilamana kekuasaan yang tidak terhad dan tidak terpusat atas seorang individu, serta berada dalam mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan hanya tertumpu pada kekuasaan individualistik, mesti selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan keseimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah idea-idea perbaikan kualiti bangsa dalam erti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku ketika memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga mesti tercermin dalam tubuh dalaman parti.³⁷

6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyedari bahawa sebagai suatu bangsa yang berbilang kaum atau plural yang terdiri dari pelbagai suku, agama dan bangsa, tatanan kehidupan bangsa Indonesia mesti sentiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut mesti dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyah*), kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.³⁸

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bercirikan humanisme religius (*insaniyah diniyah*), sangat mengambil berat tentang perkara nilai-nilai kemanusiaan yang religi, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil perkara-perkara yang baru yang lebih baik untuk dijadikan suatu tradisi yang menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Parti adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah pelapis kepemimpinan bangsa. Parti dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratik.³⁹

8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah parti terbuka dalam pengertian melampaui agama, suku, bangsa, dan lintas golongan yang dicerminkan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keahlian dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersifat bebas dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan penubuhan parti.⁴⁰

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Seperti tercantum pada situs resmi DPP PKB : www.dpp-pkb.or.id (dibuka pada hari Rabu, 17 juni 2009 pukul 21,05)

Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Bahawa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ialah mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahawa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu ialah masyarakat yang beradab dan sejahtera yang mewujudkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; dapat dipercaya, setia dan menepati janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala keadaan, tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahawa dalam tiga dekad terakhir ini, perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak yang terhad dan tidak terkawal, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Bahawa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut serta mencegah berulangnya kesalahan serupa dimasa hadapan, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratik. Didalam tatanan kehidupan yang demokratik itu, warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai bahagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah parti politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya parti politik yang bersifat perjuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratik yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta, 29 Rabiul Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M Para Deklarator : Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A.Mustofa Bisri, A.Muhith Muzadi ⁴¹

Pesantren dan Legitimasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Didirikannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai perjuangan struktural warga NU, tentu tidak begitu sahaja meninggalkan gerakan kultural yang selama ini sudah terbangun. Mabda' siyasi dirumuskan sebagai asas dalam menerapkan nilai-nilai dan etika warga PKB dalam bernegara. Sebuah transformasi nilai yang sebenarnya sudah merupakan tradisi warga pesantren. ⁴²

⁴¹ Seperti tercantum pada situs resmi DPP PKB : www.dpp-pkb.org. Diakses 17 Juni 2009 pukul 21.05.

⁴² A. Muhaimin Iskandar, PKB: Politik Rahmatan Lil 'Alamin, dalam Sahar L. Hasan et.al. (eds.), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi* Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 26.

Dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditegaskan bahwa pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki tiga tujuan utama yakni (1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; (2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; (3) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.⁴³

Ideologi politik PKB tidak dapat dilepaskan dari *platform* politik NU. Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar, NU mengembangkan visi dan misi politik sebagaimana kelompok tradisional Islam lainnya mengambil rujukan teoritik dari pemikiran al-Mawardi, al-Ghazali dan lainnya yang biasa ditemukan dalam teks NU.⁴⁴

Greg Fealy menyebut bahwa dasar resmi atau formal pendekatan politik NU sebenarnya ialah yurisprudensi abad pertengahan.⁴⁵ Disini, *fikah* memainkan peran penting dalam tradisi keberislaman NU. Dalam tradisi keilmuan Islam, fikah berkaitan dengan pengetahuan lainnya seperti *usul fikah* dan *kaedah fikah*.⁴⁶ Kaedah fikah menjadi dasar bahagi warga NU dalam membahas perilaku politik NU.⁴⁷

Setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam doktrin politik NU iaitu kebijaksanaan, kelenturan dan moderatisme. Fealy menjelaskan bahwa kebijaksanaan disini mengandung pengertian yang neutral iaitu mengambil tindakan kondusif untuk

⁴³ Pasal 7 Anggaran Dasar PKB.

⁴⁴ Greg Fealy, *Ijtihad Politik NU: Sejarah NU 1952-1967*, Jogjakarta: LKiS, 2009, hlm. 65.

⁴⁵ Ibid, hlm. 65

⁴⁶ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 8.

⁴⁷ Greg Fealy, *Ijtihad Politik*, hlm. 65. Ali Haidar, *ibid*, hlm. 8

memperoleh manfaat dan menghindari kerugian. Doktrin ini sesungguhnya bukan sahaja dibincangkan dalam masalah politik tetapi juga dalam sosial keagamaan. Ada tiga kaedah yang biasa diguna pakai oleh warga NU dalam melihat suatu permasalahan dalam kaitannya dengan kebijaksanaan ini. *Pertama, dar'ul mafaasid muqaddam ala jalb al-mashalih* (menghindari bahaya diutamakan daripada melakukan kebaikan. *Kedua*, bila dihadapkan dengan dua bahaya atau lebih, pilih salah satu yang risikonya paling kecil (*akhaffud dlarorain*). *Ketiga*, Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain.⁴⁸

Prinsip kebijaksanaan seperti ini tercermin dalam aplikasi prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan, mencegah kemunkaran). Pemahaman terhadap konsep ini berbeza-beza. Ada yang memahami bahawa penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara apapun termasuk memaksa dan menggunakan kekerasan, sebahagian lain mengatakan bahawa jalan damai, seperti membujuk dan memberi contoh peribadi sudah cukup.⁴⁹

Dalam “Pedoman Berfikir Warga NU” KH. Ahmad Siddiq mengatakan bahawa ketika berinteraksi dengan kerajaan, maka tokoh NU penting untuk berinteraksi secara individu ketika hendak memberikan pendapat.

Barangsiapa mempunyai pendapat/nasihat untuk penguasa maka djanganlah digemborkan di muka umum. Peganglah tangannja, temuilah sendirian. Kalau ia terima usul pendapat atau nasihat itu, baiklah. Kalau tidak diterimanja maka pengusul sudah memenuhi kewadajiban dan haknja.⁵⁰

⁴⁸ Ibid, hlm. 9.

⁴⁹ Aboebakar Atjeh, *Perbandingan Madzhab Ahlu Sunnah Wal Djama'ah*, Djakarta: Jajasan Baitul Mal, 1969, hlm. 62-63. Bisa juga dilihat dalam Greg Fealy, *Ijtihad Politik*, hlm. 71.

⁵⁰ Achmad Siddiq, *Pedoman Berfikir Warga NU*, hlm. 22 dikutip oleh Greg Fealy, ibid, hlm. 70.

Sikap politik Ro'is Am NU pada masa Soekarno, KH. Wahab Chasbullah menunjukkan bagaimana kebijaksanaan dalam politik NU. Wahab Chasbullah menilai bahawa penerapan amar ma'ruf nahi munkar akan efektif jika itu dilakukan dengan cara memiliki pengaruh politik di lingkungan pemerintah. Alasan inilah yang digunakan oleh Wahab untuk membenarkan keikutsertaannya dalam kabinet.⁵¹

Karakter lain dari doktrin politik warga NU adalah sikap lentur atau luwes. Dalam politik kelenturan ini terkadang menyudutkan NU. Masyumi menganggap NU sebagai parti oportunistis, lunak dan tidak tegas. Sebaliknya NU menyebut Masyumi sebagai parti keras dan kaku. Dalam konteks (kelenturan) ini, kiprah NU sangat dipengaruhi oleh figur Idham Cholid, Ketua Umum terlama yang tercatat dalam sejarah NU (1956-1984). Selama lebih kurang 28 tahun memimpin NU, Idham telah menjawat banyak jawatan. Dibiidang eksekutif, ia beberapa kali menjadi menteri, sama ada ketika masa Orde Lama mahupun Orde Baru. Ketika Bung Karno jatuh pada 1966, ia menjadi anggota presidium Kabinet Ampera I dan Kabinet Ampera II dan setelah itu ia dilantik menjadi ketua MPR/DPR pada periode 1972-1977.⁵²

Ada persamaan antara Idham Chalid dengan presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keduanya ialah sama-sama pemedato atau orator ulung.⁵³ Ucapan dan retorik keduanya dapat memainkan psikologi massa. Bezanya, jika Soekarno tampak berapi-api, Idham lebih tenang, meskipun sama-sama memiliki kekuatan. Sikap

⁵¹ Greg Fealy, *IjtihadPolitik*, hlm. 71.

⁵² Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*, Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2007, hlm. 19-59.

⁵³ *Ibid*, hlm. 52.

Idham ini sangat dipengaruhi oleh Wahab Chasbullah yang berperan dalam menentukan arah dan kebijakan parti.

Legitimasi atas partisipasi politik ditunjukkan Idham saat ia memberikan kursus pelatihan para pelapis parti pada 1969. Ia membandingkan kisah pengakuan dua ulama besar Imam Syafi'i dan Imam Hanbali ketika berada di Pengadilan Mihnah pada masa Khalifah Abassiyah, al-Makmun (w. 833). Al-Makmun yang menganut paham Muktazilah berpendapat bahawa Al-Qur'an tidak kekal (Hadits). Al-Makmun menjadikan Muktazilah sebagai ajaran yang mesti dianut oleh semua warganya, termasuk para ulama. Ia kemudian bermaksud mempertanyakan keyakinan Imam Hanbali dan Imam Syafii tentang ajaran Muktazilah tersebut. Imam Hanbali dan Imam Syafii tidak bersetuju dengan pandangan al-Makmun. Mereka meyakini bahawa al-Qur'an itu *qadim*, firman Allah yang kekal. Menurut Idham:

“Ketika Imam Hanbali ditanya oleh Khalifah al-Makmun tentang al-Qur'an, Hadits atau Qadim? Dengan penuh konsekuen Imam Hanbali menjawab: Qadim sehingga Imam Hanbali dipendjarakan, bahkan karena Imam Hanbali tetap konsekuen, beliau selalu disiksa dalam penjara tersebut. Berlainan dengan Imam Sjafi'i yang menjawabnya setjara diplomates. Katanja: Qur'an, Taurat, Indjil, Zabur, dan Suhuf, jang lima ini ada (sambil berisjarat pada genggaman tangannja) jang lima ini Hadits. (Djadi hakikat djawabannja, jang Hadits itu bukan Qur'annja, melainkan genggaman tangannja itu). meskipun demikian Khalifah jang mempunyai kekuasaan mutlak itu merasa puas, dan selamatlah Imam Sjafi'i sehingga beliau mempunyai kesempatan untuk menjebarkan adjarannja di segala pelosok sehingga 45% di dunia ini adalah penganut adjaran Imam Sjafi'i.⁵⁴

Terhadap penuturan Idham ini, Fealy menyatakan bahawa yang perlu digarisbawahi ialah cara Idham menggunakannya untuk pembenaran atas kepimpinan yang lebih mendahulukan damai dan lentur atau luwes.⁵⁵ Kerana

⁵⁴ Greg Fealy, *Ijtihad Politik*, hlm. 75.

⁵⁵ Ibid.

menurut Fealy, sesungguhnya cerita itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Kata Fealy, Imam Syafi'i meninggal pada tahun, 820 M, tiga belas tahun sebelum peristiwa mihnah, Imam Hanbali dipenjarakan oleh al-Makmun dan menjalani hukuman cambuk oleh al-Mu'tashim (pengganti al-Makmun) pada 834 M atau 835 M. Tetapi, Fealy menegaskan bahawa yang perlu diambil dari paparan Idham itu adalah bagaimana ia hendak membantah bahawa konsistensi itu sama ertinya dengan kepemimpinan yang baik.

Penjelasan lain tentang makna kelenturan dijelaskan Idham ketika ia menuturkan tentang bagaimana sikap pemimpin terhadap umatnya. Menurut beliau:

Djadi NU bersikap bidjaksana itu bukanlah bikin-bikinan pemimpinnja, bukan dibuat2 oleh seseorang, melainkan adalah mentjontoh achlak Imam Sjafi'I serta sahabat2 nabi dalam perdjuangannya. Inilah kepribadian Ahlussunah wal Djama'ah. Apa artinja pendirian jang konsekuen, namun sesudah itu mendjadi korban. Memang besar pahalanya orang jang mati sjahid dalam perdjuangan. Biar mati, tidak mendjadi soal. Itu kalau berdjuang sendiri, biar mati tidak djadi soal, tetapi kalau dibelakangnja banjak pengikutnja, orang banjak akan disusahkan karena pendirian imamnja jang konsekuen tersebut. Kalau djadi pemimpin tidak bisa hanja mementingkan kepentingannya sendiri sadja. Kalau Imam Sjafi'I berbuat konsekuen seperti itu, konsekuen untuk kepentingan dirinya sendiri maka tidak akan tersebar ajaran fahamnya. Kalau seorang pemimpin bertindak konsekuen tanpa perhitungan seperti itu, tanpa memperhatikan untung-rugi jang diakibatkannya, hanja sekadar ingin dikatakan konsekuen maka hantjurlah umat jang dipimpinnja.⁵⁶

Cerita ini menunjukkan bagaimana kelenturan Idham Cholid dengan merujuk pada sosok Imam Syafii. Menurutny kompromi ialah cara yang tepat dalam berdialektik dengan kerajaan.⁵⁷ Imam Hanbali adalah seorang yang berpendirian kukuh, teguh hati dan konsisten. Tapi, kerana sikapnya itu masyarakat kehilangan

⁵⁶ Ibid, hlm. 76.

⁵⁷ Ibid.

panutan. Sebaliknya Imam Syafi'i mungkin dianggap tidak konsisten, elastik, tetapi itu menjadikan ia memiliki peluang untuk berdakwah lebih lama. Kalau ditarik dalam konteks politik Indonesia ketika itu, cara pandangan demikianlah yang membezakan NU dengan Masyumi. Masyumi terlalu kaku yang kemudian dilarang oleh Soekarno. Sementara NU lebih lentur dan elastik dan diplomatik sehingga dapat bertahan lama.

Prinsip lain yang berkaitan dengan tradisi politik NU ialah moderatisme atau *tawasuth*, keinginan untuk menghindarkan diri dari tindakan melampau atau ekstrem dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan pendapat. Perilaku moderat atau pendekatan jalan tengah dapat dijumpai dengan jelas, sama ada dalam pemikiran Islam mahupun budaya Jawa.⁵⁸

Dalam konsepsi etika kekuasaan masyarakat Jawa, prinsip tersebut disarikan dari prinsip hidup mereka yang sangat menekankan pada tiga konsep dasar; keserasian, cocok dan rasa.⁵⁹ Keserasian menekankan agar konflik dapat dihindari dengan menekankan keseimbangan yang bersifat *status-quo*. Sementara “cocok” menekankan pemeliharaan akan ketertiban⁶⁰ yang kemudian membagi tindakan manusia menjadi patut dan tak *patut*. Sementara konsep rasa menekankan pada aspek terdalam kehidupan manusia.⁶¹ Tiga konsepsi dasar itu yang menjadi faktor integratif masyarakat Jawa yang sesungguhnya plural jika dilihat dari kategori struktur

⁵⁸ Ibid, hlm. 77.

⁵⁹ Tedi Kholiludin, *Pancasila dan Transformasi Religiositas Sipil di Indonesia*, Disertasi Program Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 201, hlm. 130-133.

⁶⁰ Patrick Guinness, *Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung* Oxford University Press, 1986.

⁶¹ Eka Darmaputera, *Pancasila: Identitas dan Modernitas*, Jakarta: BPK, 1988, hlm. 92.

sosialnya Clifford Geertz.⁶² Geertz membahagi masyarakat Jawa kedalam tiga struktur iaitu Abangan, Santri dan Priyayi.

Golongan santri di Jawa memiliki keunikan, kerana mereka juga cenderung berdialektik dengan budaya Jawa. Kecenderungan *santri* yang kuat condong pada rasa kebudayaan Jawa sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Keunikan Islam Jawa, kata Mark Woodward, tidak hanya pada aspek kebudayaan sebelum Islam yang mereka pertahankan, melainkan kerana konsep-konsep Sufi mengenai kewalian, jalan mistik, dan kesempurnaan manusia diterapkan dalam bentuk pengagungan istana atau keraton (*imperial cult*).⁶³ Geertz menambahkan hal yang membuat Islam Jawa terasa lain ialah kerana ada banyak ideologi santri yang dibungkus dengan istilah Jawa: titik berat pada fenomenologi perasaan, pada slamet sebagai tujuan, relativisme yang didasarkan atas bermacam-macam perasaan untuk bermacam-macam orang, konsep-konsep seperti “alus” dan “hati” (ati) dan sebagainya.⁶⁴ “Islam “hampir-hampir” menjadi “ilmu Kejawen” yang lain” tambah Geertz.⁶⁵

Dengan berbekal pada asal budaya demikian, maka tidak mengherankan jika paham keagamaan NU sungguh mencerminkan nilai moderatisme. KH. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur, ideolog yang sangat berpengaruh di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengembangkan gagasan peribumisasi Islam. Peribumisasi, bagi Gus Dur bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justeru

⁶² Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* Jakarta: Pustaka Jaya 1981.

⁶³ Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm. 364.

⁶⁴ Clifford Geertz, *Abangan, Santri*, hlm. 494.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 494

agar budaya itu tidak hilang.⁶⁶ Kerana itu, Gus Dur menghendaki agar umat Islam tidak terlalu merisaukan masalah kepemimpinan dan sistem pemerintahan. Gus Dur sebenarnya tengah mencoba mendialogkan antara Islam sebagai etika dengan Indonesia sebagai konteks dimana Islam hidup dan berkembang.

Partisipasi Politik Pesantren dan Hubungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Dalam perjalanan sejarahnya, keterlibatan pesantren didunia politik bukanlah cerita baru. Perjuangan politik kalangan pesantren dan NU dicirikan oleh dengan upaya mengangkat senjata seperti yang terekam di zaman revolusi. Matra itu kemudian bergeser ke meja perundingan ketika NU ikut berpartisipasi merumuskan dasar, bentuk, dan falsafah negara ini. Dengan membentuk parti, NU akhirnya turun gelanggang dan ikut berperan di gelanggang politik.⁶⁷

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang juga dikenal sebagai masa orde baru, pilihan raya hanya dapat sekali terselenggara iaitu pada tahun 1955. Pada masa itu, kekuatan politik umat Islam terpecah ke dalam enam parti masing-masing Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI dan AKUI.⁶⁸ Dalam pilihan raya umum tersebut parti-parti Islam tersebut tak satupun yang mendapat suara majoriti. Masyumi

⁶⁶ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara Agama dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001, hlm. 119.

⁶⁷ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik, 2006, hlm. 2.

⁶⁸ Ibid.

memperoleh 20.9 peratus NU 18.4 peratus, PSII 2 peratus, Perti 1.3 peratus dan PPTI serta AKUI masing-masing mendapat 0.2 peratus⁶⁹

Pilihan raya umum tahun 1971 merupakan babak awal dari masa orde baru dan yang juga awal dari proses penyederhanaan parti. Golkar (Golongan Karya) yang disokong penuh oleh rezim Soeharto berjaya memperoleh kemenangan mutlak, dalam kesempatan pertama mengikuti pilihan raya umum.⁷⁰ Dari puluhan parti, hanya 10 yang melepasi kelayakan atau verifikasi dan berhak menjadi kontestan pada Pilihan raya umum 1971. Ke-10 parti itu adalah PNI, Parti NU, Parti Muslimin Indonesia (Parmusi), Parti Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), Parti Kristen Indonesia (Parkindo), Parti Katolik, Parti Murba dan Parti Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), serta parti Golkar sebagai pendatang baru.⁷¹ Dalam hitungan kerusi, Golkar meraih 236 kerusi DPR, NU 58, Parmusi 26, PNI 20, dan PSII 10. Tiga parti meraih kerusi kurang dari 10, iaitu Parkindo (7), Parti Katolik (3), Perti (2). Bahkan Parti Murba dan IPKI tak meraih sebuah kerusi pun.⁷²

Sementara itu pada pilihan raya umum tahun 1977 merupakan pilihan raya umum pertama yang hanya diikuti oleh tiga parti politik (PPP, PDI) dan Golkar. Ini merupakan kelanjutan dari program penyederhanaan parti. PPP ditubuhkan pada 5 hari bulan Januari 1973, hasil gabungan atau fusi dari empat parti Islam (NU,

⁶⁹ Ibid, hlm. 3

⁷⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm. 423.

⁷¹ Ibid

⁷² Suara Merdeka, 14 Maret 2004.

Parmusi, PSII dan Perti). Lima hari kemudian, lahirlah PDI sebagai fusi lima parti (PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI).⁷³

Fusi parti merupakan karya Orde Baru dalam menyederhanakan parti-parti politik. Kerana dengan demikian, semakin mudahlah bagi penguasa untuk melakukan mekanisme pengawalan terhadap lawan politiknya. Apatah lagi dengan melihat kenyataan bahawa parti yang dibangun dari fusi parti-parti sangat rawan konflik. Begitu juga yang terjadi pada PPP dan PDI yang tak pernah luput dari konflik.⁷⁴

Dalam Pilihan raya umum 1982, prestasi PPP dan PDI menurun. PPP hanya mendapat 94 kerusi, Golkar 242, dan PDI 24 kursi. PPP juga terkena ketentuan UU No 3/1985 tentang Parti politik dan Golkar, yang mewajibkan mengubah lambang/tanda gambar untuk pilihan raya umum.⁷⁵ Akibatnya, lambang Ka'bah bertukar menjadi Bintang. UU ini juga mewajibkan semua parti berasas Pancasila.

Dampak bagi PPP memang sangat terasa. Akibatnya, dia bukan lagi menjadi parti Islam, melainkan menjadi parti terbuka. Ini merupakan pukulan telak bagi PPP, kerana selama ini asas Islamlah yang dapat mengikat jutaan pemilih tradisional.⁷⁶ Demikian pula dengan PDI, yang tidak lagi berasas nasionalisme. Tapi PDI masih untung kerana sejak dipimpin oleh Soerjadi, perolehan suaranya terus melejit. Sebaliknya PPP kehilangan banyak suara, apatah lagi selepas Mukhtamar NU di

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Kalau dilihat secara cermat konflik yang ada dalam PPP dan PDI juga tidak lepas dari intervensi pemerintah. Satu contoh misalnya, kerana khawatir dengan kharisma Bung Karno, rezim Soeharto melarang Guntur Soekarnoputra menjadi juru kampanye bagi PDI. Raja Dangdut Rhoma Irama, yang waktu itu menjadi juru kampanye PPP, dicekal kemunculannya di televisyen. TVRI, yang menjadi stasiun tunggal, benar-benar dikuasai Golkar.

⁷⁵ Suara Merdeka, 14 Maret 2004.

⁷⁶ Ibid.

Situbondo (1984) memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926. NU tidak lagi terlibat dalam aktivitas politik praktis, dan memberi kebebasan kepada ahlinya untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke PPP, PDI, atau Golkar.

Kerusi PPP hasil Pilihan raya umum 1987 langsung menurun menjadi 61 kerusi. Sebaliknya, PDI untuk kali pertama menembus 40 kerusi. Golkar kian menaik dengan memperoleh 299 kerusi. Padahal jumlah kerusi DPR bertambah dari pada 460 menjadi 500, sesuai dengan UU 1/1985. Hasil serupa juga diperoleh dalam Pilihan raya umum 1992, dimana PPP hanya memperoleh 62 kerusi. Sementara PDI 56 kerusi dan Golkar 282. Peruntukan untuk ABRI di DPR, yang pada awalnya 100 kerusi, berkurang menjadi 75 kerusi. Pada pilihan raya umum 1992, PPP meraih 17 peratus, Golkar 68.11 peratus dan PDI 19.40 peratus. Sementara itu pada pilihan raya umum terakhir pada masa orde baru PPP memperoleh 21 peratus, Golkar 76.50 peratus dan PDI 2.50 peratus.⁷⁷ Tak dapat disangkal, keputusan NU untuk menarik diri secara struktural dari politik praktis merupakan pukulan telak bagi PPP. NU melihat bahawa dalam negara yang totaliter, penguatan masyarakat sipil lebih harus diutamakan daripada ikut hadir dalam arena politik praktis.

Era reformasi membuka peluang bagi NU untuk kembali ke gelanggang politik.⁷⁸ Tetapi NU berusaha untuk bermain cantik. Ia tidak melibatkan diri secara praktis ke dalam lanskap politik, tetapi aspirasi ahlinya dapat tersalurkan. Kemunculan PKB adalah menjadi semacam jalan tengah agar aspirasi warga nahdliyyin tetap terjaga, sekaligus menjaga ketidakberpihakan atau independensi NU secara struktural.

⁷⁷ Suara Merdeka, 14 Maret 2004.

⁷⁸ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003, hlm. 114.

Meskipun NU sudah membidani lahirnya PKB, tetapi NU sendiri mesti tetap teguh memegang pada khittahnya, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis. Meminjam ilustrasi KH. Masdar Farid Mas'udi, PKB itu memang dilahirkan oleh NU meskipun perkawinannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Namun, perkawinan yang merupakan buah pemikiran alim ulama itu tetap sah, kerana perkawinan disertai dengan akad, cita-cita dan tujuan yang mulia.⁷⁹

Bahagi kalangan muslim tradisional, reformasi adalah momentum untuk mengukuhkan ruh atau spirit politik NU. Mukhtamar NU di Situbondo pada tahun 1984, sedikit banyak telah memberikan perisai bagi generasi NU. Pada masa itu, NU berusaha untuk meneguhkan cita-citanya ketika pertama kali ditubuhkan pada tahun 1926. Khittah 1926 merupakan upaya NU untuk melihat kembali posisinya ketika berhadapan dengan pemerintah. Kerana keputusan untuk kembali kepada khittah 1926, NU memiliki waktu untuk melakukan penelaahan terhadap khazanah intelektual yang dimilikinya.⁸⁰ Duet Gus Dur dan KH. Achmad Siddiq yang menahkodai NU menjadi salah satu alasan, mengapa kajian di tubuh NU saat itu berkembang pesat.

Ideologi NU yang dikembangkan pada masa itulah yang kemudian ditransformasi pada mabda siyasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) . Tentu sahaja bukan hanya idea-idea segar di era 80an yang dijadikan sebagai landasan etika oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) , tetapi juga prinsip-prinsip politik yang dianut

⁷⁹ Suara Merdeka, 3 Juli 2013.

⁸⁰ Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi*, Jakarta: Pensil 324, 2008, hlm, 128.

oleh *founder* NU.⁸¹ Tahun 1984 merupakan penegasan tentang pandangan NU terhadap negara. Dalam kerangka demikianlah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan transformasi nilai-nilai politik yang telah digariskan oleh NU.

Disini penting untuk memahami bagaimana memaknai khittah NU itu. Seperti digambarkan di atas, bahawa Mukhtamar 1984 di Situbondo menegaskan tentang siasat NU menarik diri dari arena politik praktis. Keadaan semacam ini sangat terkait dengan situasi politik yang sangat totalitarian. Kekuatan *civil society* sulit berkembang. Maka oleh menarik diri adalah jalan tengah yang dapat diambil.⁸²

Tetapi ada kenyataan yang berbeza ketika NU menikmati masa reformasi. Kondisi negara yang lebih terbuka, demokratik mengharuskan NU memaknai kembali hakikat khittah. Dengan membidani lahirnya PKB, hemat penulis NU sama sekali tidak menyalahi khittah. NU tidak menjadi parti politik. NU hanya memfasilitasi lahirnya parti politik. NU sendiri tetap menjadi organisasi sosial masyarakat.⁸³

Kerana kelahirannya dibidani oleh NU, maka bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pesantren serta elemen yang ada di dalamnya adalah modal untuk membangun parti ini. Kiai, santri serta lingkungan dimana pesantren itu berada adalah basis kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hemat penulis, pesantren adalah lapisan inti dari kekuatan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekali lagi, ini didasarkan atas fakta sejarah bahawa kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

(PKB) difasilitasi oleh NU.⁸⁴ Meski demikian, tidak semua pesantren berafiliasi ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kerana mereka memperoleh kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya sesuai dengan kehendaknya.

Penutup

Jika dipetakan, setidaknya-tidaknya ada tiga bentuk (model) pesantren dalam hubungannya dengan PKB. *Pertama*, pesantren yang secara terbuka menyokong PKB. Pesantren ini secara tegas menunjukkan sokongannya kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka tidak lagi menutup-nutupi sokongannya terhadap parti. Keterbukaan itu misalnya ditunjukkan ketika pengajian-pengajian, *halaqoh* atau kegiatan lainnya. *Kedua*, pesantren yang menyokong, tetapi tidak menunjukkan sokongannya itu secara terbuka. Ketertutupan itu biasanya diupayakan sebagai upaya untuk menjaga ketidakberpihakan atau neutral pesantren. Meskipun demikian, mereka bukan bererti sepenuhnya tidak berpihak. Keberpihakan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ditunjukkan secara budaya atau kultural. Retorika pimpinan pesantren dengan bentuk ini adalah dengan menegaskan bahawa pesantren yang ia pimpin tetap menjaga neutralitinya, meski secara individu ada dari pada keluarga pesantren yang ikut terlibat di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). *Ketiga*, pesantren yang berupaya untuk neutral politik. Bahagi mereka, pesantren adalah wilayah suci atau sakral yang tidak boleh dimasuki oleh politik.

Terhadap pesantren dengan bentuk pertama dan kedua, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berusaha untuk melakukan fungsi rekrutmen, agregasi, pendidikan

⁸⁴ Ibid.

atau edukasi dan artikulasi. Sementara fungsi agregasi, dan edukasi hanya diperuntukkan bagi pesantren bentuk ketiga. Ekspresi politik pesantren dalam menyokong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekurang-kurangnya dilakukan dengan dua jalur, struktural dan kultural. Jalur struktural ertinya ada keluarga pesantren yang secara politis menduduki jawatan tertentu dalam parti politik. Sementara jalur kultural dimaksudkan sebagai sokongan tanpa melibatkan diri dalam struktur organisasi. Sokongan ini dapat berupa seruan atau nasihat untuk menyalurkan aspirasinya melalui wakil yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).